

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk atas dasar berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 1847 yang menetapkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonom yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Semula wilayah kota tersebut diberi nama Haminte Kota Yogyakarta yang meliputi 12 Kementren Pamongpraja dan 2 Kementren yang berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Bantul. Pada perkembangan berikutnya, penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari undang-undang 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok pemerintah daerah sampai kepada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu : Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong Bagian tengah adalah Sungai Code Sebelah barat adalah Sungai Winongo. Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia vulcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan perkotaan dan pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan). Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata $27,2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim

kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ$ - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utarake selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan , 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulhaljo merupakan Kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu seluas 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan Kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	MANTRIJERON	1. Gedongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron	0.90 0.85 0.86 2.61	18 17 20 55	86 69 75 240
2	KRATON	1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten	0.40 0.66 0.34 1.40	10 18 14 43	44 78 53 175
3	MERGANGSAN	1. Brontokusuman 2. Keparak 3. Wirogunan	0.93 0.53 0.85 2.31	23 13 24 60	83 57 76 216
4	UMBULHARJO	1. Giwangan 2. Sorosutan 3. Pandeyan 4. Warungboto 5. Tahunan 6. Muja Muju 7. Semaki	1.26 1.68 1.38 0.83 0.78 1.53 0.66 8.12	13 16 12 9 11 12 10 83	42 63 46 38 48 55 34 326
5	KOTAGEDE	1. Prenggan 2. Purbayan 3. Rejowinangun	0.99 0.83 1.25 3.07	13 14 13 40	57 58 49 164
6	GONDOKUSUMAN	1. Baciro 2. Demangan 3. Klitren 4. Kotabaru 5. Terban	1.06 0.74 0.68 0.71 0.80 3.99	21 12 16 4 12 65	88 44 63 21 59 275
7	DANUREJAN	1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran	0.28 0.35 0.47 1.10	15 16 12 43	45 66 49 160
8	PAKUALAMAN	1. Purwokinanti 2. Gunungketur	0.30 0.33 0.63	10 9 19	47 36 83
9	GONDOMANAN	1. Prawirodirjan 2. Ngupasan	0.67 0.45 1.12	18 13 31	61 49 110
10	NGAMPILAN	1. Notopraja 2. Ngampilan	0.37 0.45 0.82	8 13 21	50 70 120
11	WIROBRAJAN	1. Patangpuluhan 2. WirobrajaN 3. Pakuncen	0.44 0.67 0.65 1.76	10 12 12 34	51 58 56

					165
12	GEDONGTENGEN	1. Pringgokusuma 2. Sosromenduran	0.46 0.50 0.96	23 14 37	89 55 144
13	JETIS	1. Bumijo 2. Gowongan 3. Cokrodiningratan	0.58 0.46 0.66 1.70	13 13 11 37	56 52 60 167
14	TEGALREJO	1. Tegalrejo 2. Bener 3. Kricak 4. Karangwaru	0.82 0.57 0.82 0.57 2.91	12 7 13 14 46	46 25 61 56 188
15	Jumlah	45	32.50	614	2.524

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 457.668, dibanding dengan tahun 2007 sebesar 434.212 jumlah penduduk kota Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 23.456 orang, jadi selama 4 tahun mengalami peningkatan 5,13%. Sedangkan prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 523.191 orang. Tingginya laju pertumbuhan ini di duga karena banyak urbanisasi yang terjadi ke Kota Yogyakarta dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Yogyakarta disamping sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian (perdagangan dan jasa) serta pusat pariwisata. Untuk mengetahui perkembangan penduduk kota Yogyakarta selama tahun 2007 sampai 2010 secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan Dari 2007-2010

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010
1	Tegalrejo	19.366	39.947	40.789	41.128
2	Jetis	15.726	31.307	31.883	31.690
3	Gondokusuman	21.535	51.442	52.545	52.586
4	Danurejan	11.666	23.617	24.114	24.327
5	Gendongtengen	11.124	22.739	23.180	23.181
6	Ngampilan	10.267	21.128	21.601	21.492
7	Wirobrajan	14.365	29.558	30.513	30.428
8	Mantrijeron	17.603	37.145	38.296	38.363
9	Kraton	11.671	24.083	24.607	24.803
10	Gondomanan	8.095	16.863	17.119	17.056
11	Pakualam	5.723	12.077	12.320	12.0789
12	Mergangsan	17.786	36.413	37.102	36.879
13	Umbulharjo	15.554	65.975	68.674	69.635
14	Kotagede	31.963	31.492	33.202	34.022
Jumlah		434.212	444.236	455.946	457.668

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016

Dari tabel diatas kecamatan dengan jumlah tertinggi adalah kecamatan Umbulharjo. Sedangkan kecamatan Pakualam merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah.

c. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

1) Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan budaya lokal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan Kota Yogyakarta secara menyeluruh.

2) Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

- a) Mengoptimalkan potensi serta daya tarik pariwisata dan budaya sebagai keunggulan kepariwisataan Yogyakarta.
- b) Menggali, melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan keragaman budaya lokal baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* sebagai daya tarik kunjungan wisatawan.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan SKPD maupun di masyarakat dan stakeholders kebudayaan dan pariwisata serta meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.
- d) Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra serta memperluas jaringan (*network*) kebudayaan dan pariwisata di tingkat lokal dan nasional.

3) Tujuan

- a) Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan local dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b) Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain.
- c) Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
- d) Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja.
- e) Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

4) Kebijakan

- a) Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.
- b) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta

kearifan local, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

5) Rencana Aksi

- a) Optimalisasi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata yang akan mendatangkan wisatawan ke Kota Yogyakarta serta menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota wisata yang terkemuka. Pemasaran pariwisata juga bertujuan untuk mengembalikan citra Yogyakarta sebagai kota wisata yang aman dan berkesan untuk dikunjungi.
- b) Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas Wisata Minat Khusus sebagai alternative lain bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta serta dapat menambah daya tarik dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta. Wisata minat khusus yang dikembangkan antara lain wisata belanja, wisata pendidikan, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata konvensi, dan sebagainya.
- c) Pengembangan Kawasan Wisata beserta potensi yang ada di dalamnya sebagai obyek wisata alternative yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan industri pariwisata sebagai fasilitas yang diberikan kepada wisatawan.
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi seni tradisional, kontemporer, maupun modern baik secara regular maupun incidental, khususnya

kesenian yang dipentaskan di malam hari sehingga menghidupkan malam-malam di Kota Yogyakarta.

- f) Memperbanyak event-event wisata, seni dan budaya, ekspo, maupun konvensi berskala local, regional, nasional, maupun internasional.
- g) Pengembangan dan pembinaan kesenian dan kebudayaan berbasis masyarakat dan kewilayahan sebagai penyangga utama kepariwisataan di Kota Yogyakarta.
- h) Pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang keindahan dan kenyamanan Kota Yogyakarta.
- i) Peningkatan kesadaran masyarakat dan seluruh stake holder terhadap persoalan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.
- j) Kemudahan aksesibilitas bagi siapapun yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

6) Program Dan Kegiatan

- a) Pengembangan Pariwisata
- b) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - (1) Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata
 - (2) Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata
- c) Pembinaan Industri Pariwisata
- d) Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

e) Festival, Lomba, dan Gelar Seni Budaya

(1) Pelestarian, Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya

7) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat, terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(2) Sub Bagian Keuangan;

(3) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.

c) Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :

(1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;

(2) Seksi Kerjasama Pariwisata.

d) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.

e) Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:

(1) Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;

(2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

f) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

(1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya;

(2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.

- g) UPT;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

8) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

a) Kedudukan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

c) Rincian Tugas

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pariwisata. rincian tugas bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata antara lain:

- (a) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pariwisata.
- (b) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang.
- (c) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelaku, usaha dan jasa pariwisata.
- (d) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang

Bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Sumber Daya Manusia yang ada di bidang ini berjumlah lima orang. dengan formasi seperti yang terlampir dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Formasi Pegawai Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata.

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata	1 orang
2	Kepala seksi pembinaan pelaku pariwisata	1 orang
3	Staff seksi pembinaan pelaku pariwisata	1 orang
4	Kepala seksi Pengembangan usaha dan jasa pariwisata	1 orang
5	Staff Seksi Pengembangan usaha dan jasa pariwisata	1 orang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki program kerja dan disesuaikan dengan dua seksi yang ada, terdiri dari:

Seksi pembinaan dan pengembangan pelaku wisata mempunyai rincian tugas antara lain :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.

- c. Menyiapkan bahan kajian, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata.
- d. Melaksanakan kerjasama pembinaan pelaku pariwisata dengan pihak terkait.
- e. Melaksanakan fasilitas uji kompetensi pelaku pariwisata.
- f. Melaksanakan kampanye sadar wisata secara berkelanjutan.
- g. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok pelaku pariwisata berbasis komunitas lokal.
- h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- i. Melaksanakan tugas lain yang dirikan oleh Kepala Dinas.

Program kerja seksi pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata adalah :

- a. Gelar kreatifitas pelaku pariwisata
- b. kampanye sapta pesona
- c. pendampingan gerak rumangsa
- d. pengembangan wawasan kepariwisataan bagi pelaku pariwisata kreatif

Secara umum tugas dari seksi pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata adalah membina dan mengembangkan pelaku pariwisata di Kota Yogyakarta. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku para pelaku wisata dan pengembangannya menjadi fokus tugas dari seksi pembinaan dan

pengembangan pelaku pariwisata. Program-program kerja dari seksi ini selalu berhubungan langsung dengan pelaku wisata Kota Yogyakarta.

Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata mempunyai rincian tugas antara lain :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan jasa pariwisata.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata.
- d. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi usaha dan jasa kepariwisataan.
- e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata.
- f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang usaha dan jasa pariwisata bersama-sama dengan pihak terkait.
- g. Melaksanakan fasilitas dan kerjasama pengembangan paket wisata di Yogyakarta dan luar daerah.
- h. Melaksanakan klasifikasi usaha dan jasa pariwisata.

- i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Program kerja Seksi pengembangan usaha dan jasa pariwisata

- a) *Monitoring* jumlah kunjungan hotel dan restoran/ rumah makan
- b) *Surveillance* usaha jasa pariwisata
- c) Survey indeks kepuasan wisatawan

Program kerja yang dilakukan oleh seksi pengembangan usaha dan jasa pariwisata dalam bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak swasta ataupun pengusaha hotel, restoran atau rumah makan dan travel agent terhadap wisatawan Kota Yogyakarta. Karena sejatinya dalam bidang pariwisata yang ditawarkan adalah pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan bagi wisatawan, sehingga wisatawan merasa ingin kembali lagi untuk berwisata ke destinasi wisata tersebut. Selain untuk meningkatkan performa pelayanan, melalui program kerja seksi pengembangan usaha dan jasa pariwisata juga memberikan tips dan saran dalam hal manajemen perusahaan, sehingga pegawai seksi pengembangan usaha dan jasa pariwisata merupakan orang yang berkompeten dalam hal manajemen dalam usaha bidang pariwisata. Hal tersebut tiada lain adalah untuk memberikan citra positif bagi wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta, dan merasa ingin kembali lagi untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat

Dinas pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu dinas yang terletak di Kota Yogyakarta dengan peran yang disandanginya sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki peranan yang sangat besar terutama dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta. Seperti yang tercantum pada misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yaitu “terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan budaya lokal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan Kota Yogyakarta secara menyeluruh”, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta berusaha mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota wisata yang bertumpu pada kekayaan budaya yang melekat pada kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan keunggulan lokal, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Masyarakat merupakan pelaku pengembangan pariwisata yang memiliki peranan yang sangat sentral, karena masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) secara umum bersentuhan langsung dengan wisatawan yang berkunjung di Kota Yogyakarta seperti memberikan pelayanan jasa maupun menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Yogyakarta tidak akan berdiri sendiri untuk senantiasa mengembangkan pariwisata di kota Yogyakarta, tanpa kerjasama antar *stakeholder* yang ada yaitu masyarakat dan pihak swasta.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi masyarakat demi mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat adalah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kegiatan kepariwisataan. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak swasta maupun masyarakat. Pihak swasta yang bekerja sama dalam bidang pariwisata adalah pemilik hotel, restoran ataupun Rumah makan, agent travel dan biro perjalanan wisata. Adapun sarana dan prasarana dalam bidang pariwisata yang telah terdata selain hotel, restoran/ rumah makan, dan usaha perjalanan pariwisata antara lain di kelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta itu sendiri yaitu gedung pertemuan dan peralatan seni budaya untuk atraksi budaya/ kesenian.

Selain menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Diantaranya adalah gelar kreatifitas pelaku pariwisata. Gelar kreatifitas pelaku pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku wisata untuk mengembangkan

keatifitasnya. Hal tersebut menjadi salah satu aplikasi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengakomodir kreatifitas pelaku wisata Kota Yogyakarta dalam bentuk pementasan, promosi wisata Kota Yogyakarta, kegiatan rutin dalam memperingati hari jadi Kota Yogyakarta hingga pentas yang dilakukan rutin setiap awal bulan. Dinas memfasilitasi dari setiap komunitas yang ingin turut serta dalam kegiatan gelar kreatifitas. sesuai dengan pernyataan Bapak SS

“Nah itu mbak, itu yang ada di mobil (sambil menunjukkan alat-alat pertunjukkan ke arah mobil yang berisi alat-alat pementasan) itu yang punya Dinas, itu termasuk alat teknis yang kita punya dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pariwisata dan kebudayaan di Kota Yogyakarta misalnya sekatenan, klangenan, jogja java karnaval dan banyak lagi dan itu nanti bareng masyarakat dari komunitas-komunitas kegiatannya”(wawancara Tanggal 6 Desember 2013, Pukul 08.57 WIB).

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Wisata Malioboro (LPPKM) Bapak RD, pada wawancara pada Hari Selasa 26 November 2013.

... ya sejauh pantauan saya sebagai bagian dari komunitas masyarakat Dinas sih lumayan bisa memfasilitasi ya mbak, untuk gelar kreatifitas masyarakat. tapi ya itu, cepet-cepetan ngambil dana buat dipake, barang-barang atau alat pementasan juga, karena kan terbatas mbak. (wawancara Tanggal 26 November 2013, Pukul 13.25 WIB).

`Selain melakukan kegiatan untuk mengakomodir kreatifitas masyarakat melalui gelar kreatifitas masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan Kampanye sapta pesona. Kampanye sapta pesona dilakukan sesuai dengan instruksi nasional yang ditetapkan Kementrian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk seluruh kawasan wisata di seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan kampanye sapta pesona dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota secara insidental disetiap kegiatan pertemuan dengan paguyuban/ komunitas masyarakat dan pelaku wisata kota Yogyakarta.

Sebagai upaya berupa non fisik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memfasilitasi masyarakat untuk membentuk suatu forum sadar wisata dan pengembangan pariwisata yang tersebar diseluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dan berjumlah 14. Forum tersebut dinamakan “Rumangsa” Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata namun masyarakat Kota Yogyakarta lebih mengenal dengan “*Rumongso*”. Hal tersebut menjadi program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata yaitu pendampingan rumangsa agar bisa menjadi forum sadar wisata yang bisa meningkatkan kesadaran pariwisata yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Rumangsa merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), karena *output* dari rumangsa adalah masyarakat bisa lebih sadar akan potensi pariwisata yang dimilikinya, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih mengeksplere potensi di sekitarnya untuk dijadikan suatu alternatif objek wisata di Kota Yogyakarta.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak SS mengenai pembentukan rumangsa. wawancara 11 November 2013.

“jadi, Rumangsa itu udah seperti semangat baru istilahnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk menggiatkan kembali pentingnya pariwisata bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Rumangsa itu sebenarnya inisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta namun Pemkot memberikan mandat langsung kepada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi pembentukan rumangsa tersebut. (wawancara Tanggal 11 November 2013, Pukul 08.35 WIB).

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu TM, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Wisata Kota Yogyakarta.

“upaya Dinas itu memfasilitasi masyarakat dari setiap kecamatan untuk bisa mengembangkan pariwisata di wilayahnya masing-masing dengan mengangkat potensi apa yang ada dengan membentuk rumangsa, ya intinya biar masyarakat sadar wisata, dan bisa hidup sejahtera dengan potensi wisata yang sangat luar biasa, di Jogja itu apa-apa menarik kok, karena wisatawan yang datang juga macem-macam jadi laku terus” (wawancara pada tanggal 25 November 2013 Pukul 08.24 WIB)

Selain memfasilitasi secara nonfisik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga memberikan dana sebesar Rp.3.000.000,- untuk penguatan lembaga rumangsa ini.

Kelembagaan Rumangsa tersebut sudah terbentuk di seluruh kecamatan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta menyerahkan bantuan sebesar Rp3 juta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan. (<http://www.investordailyindo.com>) diakses pada tanggal 5 Desember 2013 Pukul 12.40 WIB).

Berkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta maka rumangsa disetiap kecamatan terbentuk dan diberi nama oleh masing-masing pengelola. Berikut nama-nama rumangsa di 14 Kecamatan seluruh Kota Yogyakarta.

Tabel 6. Nama Rumangsa atau Kelompok Sadar Wisata di Kota Yogyakarta

No	Nama Rumangsa	Kecamatan
1	Gumregah	Gondokusuman
2	Tepok Plesiran	Mergangsan
3	Njeron Beteng	Keraton
4	Umbul Gedhe	Umbulharjo
5	Ngeksigondo	Kota gede
6	Tugu Amarto	Jetis
7	Samekto	Danurejan
8	Guntur Kinanti Wisata	Pakualaman
9	Handarbeni	Gedongtengen
10	Altar Wisata Keraton	Gondomanan
11	Tejo Makantar	Tegalrejo
12	Sekar Rinonce	Ngampilan
13	Sumangga Karsa	Mantrijeron
14	Padang Mbulan	Wirobrajan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Kelompok rumangsa menjadi salah satu hal yang diprioritaskan sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta menggelontorkan sejumlah dana untuk penguatan lembaga ini. Karena diharapkan dengan aktifnya kelompok rumangsa maka akan ada inisiatif masyarakat untuk menggali potensi wisata di lingkungannya. Setelah masyarakat sadar akan potensi pariwisata yang dimiliki disekitarnya, mereka akan membentuk kampung wisata sehingga mengundang banyak wisatawan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sejak terbentuk di masing-masing kecamatan pada tahun 2010 beberapa kelompok rumangsa telah aktif melakukan

berbagai kegiatan seperti promosi sadar wisata di kecamatan masing-masing. Karena salah satu pengembangan dari kelompok rumangsa ini membentuk kampung wisata dan sampai tahun 2013 ada 4 kampung wisata yang telah aktif dan menjadi salah satu alternatif obyek wisata di Kota Yogyakarta, yaitu kampung wisata Pandean, Kota gede, Dipowisata dan Sosromenduren. Kampung wisata akan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, karena dapat menambah *income* atau pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu pengelola kampung wisata Dipowinatan, Bapak SI.

....“pencanangan kampung wisata ini sangat berdampak positif pada pengembangan pariwisata di Yogyakarta. Selain meningkatkan kunjungan pariwisata, kampung wisata ini juga mengajak masyarakat untuk melestarikan kebudayaan Jawa dan menjaga alam sekitarnya masyarakat di kampung ini mulai sadar menjaga kebersihan lingkungan dan merawat benda-benda bersejarah di sana. Ini adalah pemberdayaan masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka”. (<http://www.nationalgeographicindo.com> Diakses pada tanggal 5 Desember 2013 Pukul 12.43 WIB).

Selain program-program kerja yang dilakukan diatas dan melibatkan masyarakat maupun swasta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat adalah mengadakan pentas atau acara seni dan budaya di Toegoe Serangan Umum 1 Maret atau di kawasan 0 KM untuk menghibur wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Kegiatan pertunjukkan seni dan budaya dilakukan setiap awal bulan dan akhir bulan serta menghimpun seluruh

paguyuban yang ada di Kota Yogyakarta untuk mengisi acara pertunjukkan tersebut. hal itu sesuai dengan pernyataan Bapak RD, Ketua Paguyuban LKKM Malioboro :

Sebenarnya peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cukup aktif karena setiap awal bulan Dinas menyelenggarakan pertunjukan di OKM, dengan menghimpun seluruh paguyuban untuk serta dalam Pertunjukan senibudaya tersebutm biasanya yang ikut ya tokoh-tokoh budaya atau perwakilan paguyuban yang ada di Kota Yogyakarta Wawancara pada 26 November 2013 Pukul 13.45 di Malioboro).

Juga diperjelas oleh pernyataan Bapak SS :

“... ya mbak memang sudah menjadi agenda kami setiap satu bulan diadakan pertunjukan demi menghibur wisatawan yang datang ke Jogja, namun tidak hanya diadakan di 0 KM saja, untuk bulan ini saja kita mengadakan pertunjukannya di XT Square, kebetulan sedang ada yang dipromokan juga disana, jadi kita kerjasama dengan pihak sana.”
(Wawancara pada 6 Desember 2013 Pukul 8.38 di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta).

Dalam menjalankan perannya di bidang pariwisata dan budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memfasilitasi wisatawan yang ingin mendapatkan informasi mengenai pariwisata di Kota Yogyakarta melalui fasilitas *Tourist Information Center*, selain itu ada fasilitas untuk menanggapi keluhan, masukan dan saran wisatawan maupun masyarakat demi kemajuan pariwisata di Kota Yogyakarta. Keluhan, saran dan masukan dari berbagai pihak ditampung dan di apresiasi oleh pihak Dinas dan kemudian diproses dalam rangka perbaikan untuk ke depannya.

Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta menyediakan sarana dan prasarana untuk pertunjukkan seni dan budaya di Kota Yogyakarta

antara lain peralatan musik, gamelan, panggung, dan alat-alat seni, budaya lainnya. Dalam kegiatan tersebut masyarakat selalu berpartisipasi dan turut serta secara aktif.

Selain fasilitas langsung bagi masyarakat dan wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga memfasilitasi pihak swasta dalam rangka promosi usaha jasa pariwisata. Seperti penyediaan sarana promosi di loker Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mempromosikan melalui penyimpanan pamphlet di Kantor Dinas, maupun promosi melalui media internet dan di tampilkan di website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

2. Faktor-faktor yang Mendukung Pengoptimalan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan perannya untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana-prasarana, kemitraan (*partnership*) dan juga partisipasi masyarakat. Berikut akan dipaparkan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mendukung dalam pengoptimalan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta:

a. Ketersediaan anggaran

Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala bentuk program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan

masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu akan mempengaruhi efektivitas suatu program dan bisa menjadi kendala apabila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai.

Berkaitan dengan pariwisata Kota Yogyakarta yang perkembangan setiap tahunnya cukup pesat. Maka anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup besar. Namun untuk porsi pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta lebih besar diberikan pada Bidang Kebudayaan, karena citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya harus terus melekat sehingga suntikan dana untuk bidang kebudayaan lebih besar dibandingkan bidang pariwisata.

Dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat maka diperlukan banyak kegiatan untuk bisa merangkul masyarakat dalam pengembangan pariwisata, seperti kampanye sadar wisata, meningkatkan *softskill* masyarakat dan pelaku wisata hingga memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata seperti LPKKM (Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro) yang ada di Kawasan Wisata Malioboro. Namun kesemua kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kegiatan dan program diprioritaskan kepada hal yang sifatnya darurat dan sangat penting saja. Melihat kondisi pariwisata Kota Yogyakarta yang perlu ada pembenahan terutama dalam bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata maka anggaran menjadi hal penting dan sangat mendukung untuk melakukan pembenahan tersebut.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal pemerintah untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi ukuran optimal atau tidaknya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan kebudayaan, tersedianya sarana dan prasarana tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada efektivitas program dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Dari hasil pengambilan data yang telah dilakukan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

	Nama barang sarana/prasarana	Ka. Din.	Sek r.	Bid. PKP	Bid. P3	Bid. PO DT W	Bid. keb	Jml
1	Gedung kantor	-	-	-	-	-	-	1500 m2
2	Kendaraan Roda 4	1	1	1	1	1	1	6 unit
3	Kendaraan Roda 2	-	2	-	-	-	-	2 unit
4	Bus		1					1 unit
5	Perangkat Komputer	1	3	1	1	1	1	8 unit
6	Laptop	-	1	-	-	-	-	1 unit
7	LCD	-	1	-	-	-	-	1 unit
8	Kamera	-	1	-	-	-	-	1 unit
9	Telepon	1	1	-	-	-	-	2 unit
10	Telepon ruangan	1	1	1	1	1	1	6 unit
11	Tanah	-	-	-	--	-	-	7.755 m
12	wireless	-	2	-	-	-	-	2 Unit
13	HT	-	2	-	-	-	-	2 unit
14	printer	-	2	1	1	1	1	6 unit
15	Televisi	-	2	-	-	-	-	2 unit
16	Kipas Angin	-	1	-	-	-	-	1 unit
17	AC	1	1	1	1	1	1	6 unit
18	Brankas	-	1	-	-	--	-	1 unit
19	Meja Kerja Kayu	-	6	3	3	3	3	18 unit
20	Kursi Kerja	-	19	-	-	-	-	19 unit
21	Meja Rapat Kayu	-	5	-	-	-	-	5 unit
22	Kursi Rapat	-	45	-	-	--	-	45 unit
23	Ruang Rapat	-	-	-	-	-	-	1 unit
24	Gamelan	-	-	-	-	-	-	1 set
25	Alat Musik	-	-	-	-	-	-	1 set
26	Alat Kebersihan	-	-	-	-	-	-	1 set
27	Ruang Komputer	-	1	-	-	-	-	1 unit
28	Toilet	-	1	-	-	-	-	1 unit
29	Ruang Security	-	-	-	-	-	-	1 unit
30	Lahan Parkir	-	-	-	-	-	-	200m2

Sumber : Data Kepariwisataaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Sarana dan prasarana dinas pariwisata dan kebudayaan kota Yogyakarta terdiri dari sarana prasarana fisik di kantor dinas dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta. Secara umum sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta sudah memenuhi tetapi belum ideal jika dilihat dari jumlah pegawai dan luas ruangan Dinas.

Untuk sarana dan prasarana lain seperti sarana teknis untuk menggelar pertunjukkan seni dan budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup memiliki alat yang lengkap, dan sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti klangenon Jogja, ketoprak, pentas budaya, jogja java karnaval, wayang kulit juga sekatenan. Hal tersebut bisa terpenuhi karena berhubungan dengan kebudayaan Kota Yogyakarta yang menjadi prioritas pemerintah Kota Yogyakarta.

Selain sarana prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, maka perlu ada fasilitas penunjang kegiatan kepariwisataan. Fasilitas yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepariwisataan adalah :

Tabel 8. Sarana Penunjang Bidang Pariwisata Kota Yogyakarta.

No	Jenis	2011	2012
	ramuwisata	175	175
	edung pertemuan	18	18
	dustri kerajinan	450	450
	raksi budaya/kesenian	628	628
	sosiasi wisata	27	27
	ampung/ desa wisata	6	6

Sumber : Data Kepariwisataaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Sarana penunjang bidang pariwisata dengan jumlah diatas cukup baik apalagi dengan adanya 6 kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta dapat menambah alternatif wisata bagi wisatawan untuk tidak hanya berkunjung ke tempat-tempat familiar saja seperti Malioboro.

c. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan yang dijalin oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan pihak swasta maupun masyarakat. Sehingga 3 elemen penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta harus berjalan seiringan tanpa ada ketimpangan apapun. Agar tercipta sinergitas dan hubungan yang solid antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Kemitraan yang telah dijalin sampai saat ini dengan pihak swasta meliputi organisasi atau komunitas pengusaha hotel dan restoran PHRI

(Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), GPY (Gabungan Perhotelan Yogyakarta), APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia), untuk PHRI di khususkan untuk hotel-hotel berbintang, sedangkan GPY untuk Hotel non bintang. Dengan pramuwisata antara lain HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), Rumah *Guide*, PPTSY (Paguyuban Pemandu Taman Sari Yogyakarta), P2WKS (Paguyuban Pemandu Wisata Keraton dan Sekitarnya. Kemitraan yang dilakukan dengan pihak swasta biasanya berupa *sponsorship*, promosi, menyelenggarakan event-event yang bersifat momentum dan insidental, juga monitoring dan pembinaan bagi pelaku wisata Kota Yogyakarta baik itu swasta maupun masyarakat.

Berikut disajikan jumlah hotel di Kota Yogyakarta yang merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dari pihak swasta.

Tabel 9. Jumlah hotel melati dan hotel berbintang dan rata-rata tingkat hunian

NO	Tahun	Hotel bintang		Hotel Melati		Total
		Jumlah	Tingkat hunian	jumlah	Tingkat hunian	
1	2007	22	70%	240	63%	262
2	2008	21	71,8%	264	65%	285
3	2009	22	78,6%	270	67,4%	292
4	2010	22	79,8%	277	70%	299
5	2011	27	81,5%	292	72,8%	319
6	2012	31	82%	314	76%	345

Sumber : Data Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan tabel yang menunjukkan jumlah Jumlah hotel melati dan hotel berbintang dan rata-rata tingkat hunian dari mulai Tahun 2007 hingga Tahun 2008, jumlah hotel maupun tingkat hunian hotel bintang mengalami peningkatan, walaupun hanya sedikit dibandingkan peningkatan hotel melati yang semakin menjamur di Kota Yogyakarta. Dikarenakan lahan Kota Yogyakarta yang semakin penuh dan sesak dengan gedung-gedung bertingkat, sehingga perkembangan hotel bintang akan sangat terkendala oleh lahan Kota Yogyakarta yang sangat terbatas. Hotel melati cukup pesat perkembangannya karena disamping tidak terlalu membutuhkan lahan yang banyak, juga minat wisatawan yang lebih tertarik dengan hotel melati karena tarif yang relatif murah. Apalagi dengan maraknya wisatawan *backpacker* yang datang ke Kota

Yogyakarta akan lebih banyak meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menginap di hotel melati.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selalu melakukan monitoring dan pembinaan terhadap beberapa hotel yang ada di Kota Yogyakarta dengan memberikan masukan dan saran dalam manajemen pelayanan usaha bidang pariwisata, dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta terutama dalam bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata.

Selain hotel, pihak swasta yang menjadi mitra kerja dalam bidang pariwisata adalah pengusaha restoran atau rumah makan dan kafe, hal tersebut karena kuliner merupakan salah satu *icon* wisata di Kota Yogyakarta. Berikut disajikan tabel jumlah restoran/ rumah makan dan kafe di Kota Yogyakarta.

Tabel 10. Jumlah Restoran / rumah makan dan caffe di Kota Yogyakarta

No	Klasifikasi	2011	2012
1	estoran/ rumah makan	289	291
2	afe	21	20

Sumber : Data Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Tabel 10 menunjukkan jumlah restoran dan rumah makan juga kafe yang ada di Kota Yogyakarta, namun jumlahnya tidak terlalu mengalami peningkatan secara signifikan. Dikarenakan restoran dan rumah makan akan kurang menarik jika dibandingkan dengan pedagang lesehan dan angkringan yang menjadi ciri khas dari Kota Yogyakarta itu sendiri. Wisatawan banyak

memilih melakukan wisata kuliner ke lesehan, pedagang kaki lima, maupun angkringan dibandingkan dengan restoran/ rumah makan.

Selain bermitra dengan pengusaha hotel, restoran dan rumah makan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga melakukan pendataan, monitoring terhadap usaha perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata. Berikut disajikan jumlah usaha perjalanan wisata Kota Yogyakarta.

Tabel 11. Jumlah Usaha perjalanan wisata di Kota Yogyakarta

No	Jenis Usaha	2011	2012
1	Biro Perjalanan/ wisata	190	219
2	Agen Perjalanan/ wisata	6	7

Sumber : Data Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Dalam satu tahun jumlah usaha perjalanan wisata di Kota Yogyakarta cukup meningkat. Terutama biro perjalanan wisata yang meningkat kuantitasnya sebanyak 29. Hal tersebut disebabkan karena kondisi Kota Yogyakarta yang semakin ramai dikunjungi masyarakat. Sehingga pihak swasta atau pengusaha terdorong untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata baik itu biro perjalanan maupun agen perjalanan/ wisata.

Sedangkan kemitraan yang dijalin dengan masyarakat meliputi organisasi berbasis masyarakat yang sering dikenal dengan nama paguyuban. Paguyuban merupakan sebuah kumpulan orang atau masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama dan memiliki struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, perbedaannya dengan organisasi yang lain,

organisasi ini merupakan organisasi yang lebih bersifat fleksibel, dan dibentuk atas dasar kesamaan hobi, profesi dan kepentingan.

Paguyuban atau komunitas yang ada di Kota Yogyakarta dan berhubungan dengan pariwisata antara lain Paguyuban becak yaitu Aspabeta (Asosiasi Paguyuban Becak Pariwisata), PBWY (Paguyuban Becak Wisata Yogyakarta), paguyuban pedagang kaki lima antara lain, Pelmani (PKL yang membelakangi toko), Paguyuban Tridharma (Pedagang kaki lima menghadap toko), Paguyuban Padma (Pedagang kaki lima angkringan), Paguyuban Handayani (Pedagang kaki lima makanan siang hari), paguyuban pasar sore, PPLM (Pedagang kaki lima lesehan malam hari). Selain Paguyuban Pedagang Kaki Lima, ada pula paguyuban kusir andong, juru parkir, Kelompok Forum masyarakat Penggiat Pariwisata “Rumangsa” yang tersebar di 14 Kecamatan Kota Yogyakarta, dan juga pengelola kampung wisata yang relative sudah aktif di Kota Yogyakarta yaitu kampung wisata Dipowinatan, Cokrodiningratan, Kadipaten, Purbayan, Sosromenduran. Semua paguyuban tersebut menjadi mitra kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat.

d. Peran Serta masyarakat (*participation*)

Kiprah masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya peran yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di suatu wilayah sangat berbeda, ada masyarakat yang kooperatif dan sangat mudah untuk diajak bekerja sama, namun ada pula masyarakat yang tidak kooperatif, apatis dan

acuh terhadap segala program pemerintah. Masyarakat Kota Yogyakarta merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki nilai kebudayaan yang sangat kental dan cukup disiplin dalam berbagai hal. Menurut apa yang disampaikan oleh Bapak SS Masyarakat Kota Yogyakarta sangat mudah untuk diajak kerja sama dan cukup peduli terhadap kemajuan Kota Yogyakarta. Namun adakalanya akan terlihat tidak peduli apabila yang menjadi ajakan, himbauan dan larangan itu secara tidak langsung bersinggungan dengan kepentingannya. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengupayakan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kepariwisataan Kota Yogyakarta melalui paguyuban dan komunitas-komunitas yang ada. Agar saran, kritik, keluhan dan aspirasi dari setiap masyarakat Kota Yogyakarta melalui paguyuban bisa menjadi masukan dan kemudian bisa ditindak lanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat

Setiap organisasi pasti merancang dan melakukan upaya maupun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang menangani pariwisata dan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami berbagai hambatan

ketika menjalankan peran dan fungsinya. Berbagai hambatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah :

a. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting untuk menentukan terselenggaranya program atau kegiatan. Tanpa adanya anggaran yang memadai maka program pun akan sulit dijalankan secara optimal. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta khususnya untuk porsi bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata Kota Yogyakarta menyebabkan program-program yang dilakukan hanya bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin. Karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak mampu melakukan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat maupun pihak swasta tanpa dana yang mencukupi, sehingga berakibat dari kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku wisata Kota Yogyakarta dan hanya dilakukan setelah ada kasus yang mendesak.

Walaupun memang secara strategis sebenarnya masalah anggaran bukan hal yang utama dalam rangka menjalankan peran dan fungsi suatu organisasi, Dinas Pariwisata bisa memanfaatkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan Sponsor dalam menyelenggarakan program atau kegiatan. Misalnya pihak pengusaha hotel yang ingin mensponsori kegiatan pembinaan pelaku pariwisata Kota Yogyakarta atau pihak swasta yang memiliki dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang ingin disumbangkan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan masyarakat di sekitar objek

wisata. Hal tersebut bisa mengurangi beban pemerintah dalam persoalan anggaran.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta hanya terdiri dari 5 pegawai. Padahal program yang dicanangkan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cukup berat dan membutuhkan banyak personil untuk pengoptimalan pelaksanaan program-programnya. Apalagi program-program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta secara keseluruhan berhubungan langsung dengan seluruh stakeholders bidang pariwisata. Banyak kegiatan yang dilakukan dilapangan dan sangat membutuhkan banyak pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni.

Kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai berakibat pada kurang optimalnya aktualisasi dari peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk melakukan monitoring atau memberikan motivasi terhadap para pelaku wisata Kota Yogyakarta sehingga program hanya bersifat insidental. Selain itu kurang optimalnya juga aktualisasi peran untuk merangkul seluruh stakeholders untuk bersama-sama melakukan pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat terlihat bahwa belum adanya kegiatan koordinasi

atau evaluasi bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

c. Kondisi Masyarakat yang Majemuk

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selain keterbatasan anggaran dan sumber Daya Manusia adalah kondisi masyarakat yang majemuk dan terdiri dari banyak masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Hal tersebut menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk menjalankan peran dan fungsinya.

Kondisi masyarakat yang majemuk juga memberikan dampak akulturasi budaya lokal. Sehingga Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta akan lebih sulit karena selain mempertahankan kebudayaan lokal yang ada, juga menata dan mengkomunikasikan segala susuatunya terhadap masyarakat yang majemuk tersebut. Yang terjadi adalah misalnya ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta telah melakukan pembinaan terhadap pelaku wisata asli masyarakat Kota Yogyakarta namun yang membuat masalah adalah masyarakat pendatang yang tidak tertib dan tidak mentaati aturan yang berlaku.

C. Pembahasan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat dan berlandaskan kebudayaan telah melakukan

berbagai upaya dan menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah. Kompleksitas masyarakat Kota Yogyakarta yang terdiri dari masyarakat pendatang maupun lokal menjadi salah satu kendala bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Perlu peran aktif dan strategis bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta agar tujuan berdirinya Dinas yang menangani bidang pariwisata dan kebudayaan ini memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta khususnya dalam memberdayakan masyarakat lokal kota Yogyakarta.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana Gayatri (2005:95) dan Siagian (2000: 142-150) Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan bidang pariwisata sebagai :

1. Fasilitator

Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam hal sarana prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bisa berupa fisik maupun non fisik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang lebih dominan adalah memfasilitasi dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk non fisik seperti fasilitas pembinaan dan perhatian terhadap

kegiatan-kegiatan pengembangan pariwisata masih kurang optimal. Hal tersebut bisa terlihat untuk kelembagaan rumangsa, Dinas Pariwisata dan kebudayaan hanya memfasilitasi pembentukan, namun tidak memperhatikan dan memonitoring kegiatan-kegiatan rumangsa. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya sebatas membentuk tanpa memberikan fasilitas untuk mengembangkan dan membina.

Menurut Bambang Sunaryo (2013: 23) masyarakat menjadi salah satu fasilitas utama yang perlu dipersiapkan dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah kurang siap dan sadarnya masyarakat akan pariwisata sehingga menimbulkan banyak keluhan dari wisatawan akibat pelayanan yang buruk dari para pelaku wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai fasilitator seharusnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui dan melakukan sinergitas untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di Kota Yogyakarta. Masyarakat di sekitar destinasi wisata merupakan komponen pokok dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Keberadaanya dapat menjadi cerminan atau citra dari destinasi tersebut. Yang lebih dibutuhkan dalam permasalahan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta salah satunya adalah mempertahankan citra positif dengan slogan berhati nyaman, namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat minim memfasilitasi akan kesiapan pelaku wisata Kota Yogyakarta dan hanya melakukan pembinaan ketika terjadi kasus yang dilaporkan oleh wisatawan, sehingga bersifat insidental saja. Apabila dikaitkan dengan indikator ketercapaian peran sebagai fasilitator

seharusnya Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta harus bisa menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas. Salah satunya adalah fasilitas pembinaan dan pengembangan pelaku masyarakat, namun hal ini belum dilakukan secara efektif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dikarenakan kendalanya adalah anggaran dan SDM Dinas Pariwisata yang minim. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Fajrul Fallah yang berjudul Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo bahwasanya peran fasilitator sangat dominan dalam aktualisasi perannya sebagai pemerintah. Walaupun sebenarnya untuk pengembangan pariwisata yang dibutuhkan tidak hanya fasilitas namun dukungan dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* terkait. Namun satu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta adalah permasalahan perijinan, baik itu perijinan usaha bidang pariwisata seperti hotel, rumah makan maupun restoran telah dikelola melalui satu atap yaitu Dinas Perijinan Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadi keunggulan dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta karena bisa mengurangi praktek korupsi, apalagi masalah perijinan yang riskan terhadap praktek korupsi.

2. Implementor

Sebagai pemerintah, Dinas pariwisata dan kebudayaan tentu memiliki tanggung jawab yang besar demi terlaksananya semua program kerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pariwisata. Namun tidak

se penuhnya peran itu dapat diserahkan kepada swasta maupun masyarakat. Karena adakalanya tugas tertentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta dilakukan atas dasar instruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban karena memang merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Namun selain melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi instruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga perlu melakukan inovasi program maupun kegiatan dalam rangka pengembangan pariwisata. Namun, hingga saat ini berdasarkan penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta hanya menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya tanpa ada inovasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Implementasi berbagai program, kegiatan maupun kebijakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta secara keseluruhan terlaksana. Namun apabila dilihat dari segi efektivitasnya diantaranya belum bisa efektif seperti program-program yang bersifat monitoring dan terjun langsung ke masyarakat maupun pelaku wisata Kota Yogyakarta. Hal yang menjadi hambatan adalah keterbatasan anggaran dan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Disamping keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia, hal yang perlu menjadi perhatian dari pihak pemerintah adalah bahwa semakin maju era pengembangan pariwisata maka semakin banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terutama kapasitas sumber daya manusia yang bisa mengelola pariwisata menuju *good tourism governance*.

3. Motivator

Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya pariwisata, selain itu untuk *stakeholder* lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder.

Untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* maka yang perlu ditingkatkan adalah peran motivator agar dapat memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat maupun swasta. Dinas perlu berperan aktif dan agresif untuk memainkan peran motivator demi terbangunnya pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta.

Pariwisata bisa dikatakan sebagai suatu industri, maka didalamnya akan sangat butuh dukungan dari investor atau pengusaha swasta serta masyarakat. Investor sebagai pemilik modal bisa menanamkan modalnya di objek-objek wisata, pengusaha swasta bisa mengembangkan usahanya dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja untuk pengembangan usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya untuk memotivasi masyarakat maupun pihak swasta agar bisa bekerja sama dengan baik membangun pariwisata di Kota Yogyakarta. Namun apabila dilihat dari indikator ketercapaian suatu peran motivator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta belum menjalankan peran motivator secara efektif. Hal tersebut bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan untuk memotivasi para pelaku wisata hanya bersifat momentum dan insidental, sehingga hasil yang diharapkan yaitu kesadaran pariwisata pelaku wisata Kota Yogyakarta belum memberikan hasil yang maksimal.

4. Dinamisor

Peran dinamisor merupakan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *good tourism governance*. Peran Dinas sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan sangat menentukan pengembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta ke depannya. Kerjasama maupun keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata perlu difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Karena sudah dipastikan Dinas tidak bisa berjalan sendiri dan bekerja sendiri untuk mengembangkan pariwisata di Kota Yogyakarta tanpa campur tangan *stakeholder* yang ada yaitu swasta dan masyarakat. Kegiatan pariwisata bersifat sistemik dan pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan

secara terpisah, sehingga mau tidak mau memang harus ada sinergitas antar *stakeholder* yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka menjalankan peran dinamisator adalah melakukan monitoring *stakeholder* terutama swasta. Selain melakukan monitoring terhadap usaha jasa pariwisata di Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melakukan usaha atau pendekatan dengan pihak swasta untuk merekomendasikan dana CSR nya untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta. Karena banyak ditemukan pihak swasta yang memiliki usaha di Kota Yogyakarta namun menyalurkan dana CSR ke Kabupaten lain. Sehingga dengan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melakukan pendekatan terhadap pihak swasta tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dan swasta juga sangat penting dalam dalam penyusunan suatu regulasi dalam konteks wilayah ini adalah Peraturan daerah atau Perda. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan penyusunan peraturan daerah masih minim. Mereka lebih dilibatkan dalam tahap pelaksanaan karena memang pelaku wisata atau swasta maupun masyarakat merupakan objek dari kebijakan yang dibuat.

Hubungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan seluruh *stakeholder* baik itu masyarakat maupun swasta secara umum dikatakan belum cukup baik karena ternyata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Yogyakarta belum bisa merangkul seluruh *stakeholder* untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta terutama dalam hal pembuatan kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta kurang agresif dalam merangkul masyarakat untuk partisipasi aktif dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism*. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan monitoring yang selalu dilakukan rutin terhadap pihak swasta untuk mengingatkan pajak atau monitoring kunjungan, namun terhadap masyarakat kegiatan pembinaan pun dilakukan secara insidental bahkan tidak dilakukan apabila belum ada kasus yang mendesak. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) tidak akan efektif apabila tidak ada gerak cepat dan agresif dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk berusaha dekat dengan masyarakat dan bersinergi untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.